

# PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PADA MEDIA *ONLINE* RRI.CO.ID

Vanessa Dwi Octaviani, Joyo Nur Suryanto Gono  
Email: [vanessadwioctaviani@gmail.com](mailto:vanessadwioctaviani@gmail.com)

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suryo, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275  
Telepon (024) 74605407 Faksimile (024) 74605407  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstrak

RRI.co.id adalah media *online* di bawah Lembaga Penyiaran Publik RRI yang bersifat netral dan independen, namun tetap mendukung kebijakan pemerintah seperti Kebijakan Efisiensi Anggaran. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk melihat bagaimana media ini membingkai isu tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa RRI.co.id menggambarkan kebijakan ini sebagai sesuatu yang perlu dijalankan dengan hati-hati karena dapat berdampak fatal, serta memberi ruang bagi kritik publik, khususnya terkait sektor pendidikan dan tenaga kerja. Media ini menekankan pentingnya keadilan sosial, kolaborasi, transparansi, dan pendekatan tepat sasaran dalam pelaksanaan kebijakan, serta menunjukkan kecenderungan mengikuti narasi pemerintah namun tetap menyisipkan sudut pandang kritis. Pemberitaannya mencerminkan upaya membentuk pemahaman publik melalui seleksi isu dan sudut pandang, dengan fokus pada pendidikan, pembangunan ekonomi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

**Kata kunci:** *framing*, efisiensi anggaran, RRI.co.id, kebijakan publik, media *online*

## Abstract

*RRI.co.id is an online media platform under the Public Broadcasting Institution RRI, which maintains a neutral and independent stance while supporting government policies such as the Budget Efficiency Policy. This study applies Robert N. Entman's framing analysis model to examine how the media frames the issue. The findings show that RRI.co.id presents the policy as something that must be implemented cautiously due to its potentially serious long-term impacts, while also providing space for public criticism, particularly concerning the education and labor sectors. The media emphasizes the importance of social justice, collaboration, transparency, and targeted approaches in the policy's implementation. While the reporting tends to align with the government's official narrative, it still includes critical perspectives. Overall, the coverage reflects an effort to shape public understanding through issue selection and viewpoint emphasis, focusing on education, economic development, and the Free Nutritious Meal (MBG) program.*

**Keywords:** *framing*, budget efficiency, RRI.co.id, public policy, online media

## A. PENDAHULUAN

Indonesia mengganti Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan setiap lima tahun sekali melalui Pemilihan Umum. Setiap pergantian presiden dan wakil presiden, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada kebijakan baru selama periodenya berlangsung. Salah satunya adalah Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kebijakan Efisiensi Anggaran ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikutip berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kebijakan Efisiensi Anggaran adalah sebagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana negara dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi global, peningkatan utang, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, Kebijakan Efisiensi Anggaran juga bertujuan agar seluruh rupiah yang dikeluarkan bisa bermanfaat untuk khalayak luas sebesar-besarnya (*Inpres No.1, 2025*).

Kehadiran dari Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, tentunya kerap kali menuai pro dan kontra bagi beberapa orang atau lembaga yang terdampak akibat dari adanya kebijakan ini (Zaluchu, 2025). Salah satunya ialah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Dari adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, LPP RRI sempat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

secara massal kepada para karyawan lepasnya, seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga kontributor seperti, penyiar, produser, serta beberapa *music director* pada stasiun yang berada di daerah (Anggela, 2025). Namun, akhirnya dibatalkan setelah Komisi VII DPR RI mendesak untuk membatalkan pemecatan karyawan tersebut (Saputra et al., 2025)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa LPP RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran yang termasuk badan hukum yang dibentuk oleh negara, bersifat mandiri, tidak memihak, non-komersial, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan demi kepentingan publik dengan stasiun penyiaran pusat yang berlokasi di ibukota Negara Republik Indonesia. Selain siaran nasional, LPP RRI juga memiliki program siaran lokal di berbagai daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat (*UU No. 32, 2002*). Hal ini memungkinkan RRI menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) (*PPID LPP RRI, n.d.*).

Sebagai salah satu lembaga yang dimiliki secara penuh oleh negara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tentunya mendapatkan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat regional atau daerah (*UU No. 32, 2002*). Maka dari itu, LPP RRI juga bisa dikatakan sebagai kaki tangan dari pemerintahan dalam menjalankan perintah baik dari Presiden maupun Wakil Presiden. Berdasarkan dengan salah satu misinya, yakni “*memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden*”, LPP RRI seharusnya dapat mendukung segala kebijakan pemerintah yang telah dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan cara penyampaiannya yang informatif, edukatif, *entertaining*, serta tetap memiliki kontrol sosial di dalamnya.

Media massa berfungsi sebagai sumber informasi, yang bertindak sebagai penyedia dan penyebar informasi tentang berbagai peristiwa, kejadian, kenyataan, dan berbagai hal lainnya yang terjadi di masyarakat (McQuail, 2010). Media massa di Indonesia, termasuk media *online*, berperan strategis untuk mengedukasi masyarakat terutama mengenai berbagai kebijakan publik (KPPN, 2024). Salah satu bentuk media massa yang kini semakin berkembang adalah media *online*, termasuk di antaranya adalah RRI.co.id, yang merupakan portal berita milik LPP RRI. Media *online* seperti RRI.co.id ini menjadi salah satu media arus utama (*mainstream*) yang menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan dan program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan anggaran negara. Seiring dengan meningkatnya konsumsi informasi secara daring, media *online* menjadi

*platform* yang efektif dalam menyampaikan berita dan analisis mengenai isu-isu penting, termasuk topik Kebijakan Efisiensi Anggaran. Pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran di media *online* sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat.

*“Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menyatakan arahan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 akan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di Jawa Timur.”* (Konten 1)

*“Kita yakin, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu sudah melalui pertimbangan yang matang, dan ada skala prioritas bagi masyarakat.”* (Konten 2)

Konten 1 dan 2 di atas merupakan contoh dari isi artikel yang disajikan oleh RRI.co.id mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kedua artikel di atas merupakan artikel yang bisa dikatakan sudah sesuai atau sejalan dengan salah satu misi LPP RRI yang berbunyi “*memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden*”. Kebijakan Efisiensi Anggaran pada kedua artikel tersebut dikemas dengan cara yang positif oleh RRI.co.id, yang kemudian disajikan kepada masyarakat sebagai para pembacanya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu fungsi dari LPP RRI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagai media informasi yang edukatif, dalam hal ini mengedukasi mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. Dengan kata lain, RRI.co.id telah menyajikan pemberitaan

mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai hal yang positif kepada masyarakat.

Namun, selain fungsi di atas, LPP RRI juga memiliki fungsi lain. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Guna melayani kepentingan masyarakat, LPP RRI juga perlu melibatkan partisipasi publik yang memerlukan keterlibatan masyarakat seperti di dalam konten-kontennya. Hal ini juga diperkuat dengan sifat LPP RRI yang independen, netral, dan non-komersial. Sehingga, keberpihakan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik terhadap masyarakat juga turut dilakukan dalam penyajian konten-kontennya.

*“Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Efisiensi anggaran dapat menyebabkan berkurangnya subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi, yang pada akhirnya membebani mahasiswa dengan biaya kuliah yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi anggaran juga berisiko memengaruhi program beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemotongan anggaran dapat menyebabkan pengurangan jumlah penerima beasiswa atau besaran dana yang diterima, yang berdampak pada akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.”* (Konten 3)

*“Disisi lain efisiensi anggaran tetapi jangan sampai mengorbankan*

*kesejahteraan rakyat dengan mengabaikan bidang-bidang yang penting bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat ini harusnya menjadi prioritas. Jadi prinsipnya bahwa kebijakan pengurangan/efisiensi anggaran ini harus berhati-hati, dampak bagi masyarakat ini harus dipertimbangkan.”* (Konten 4)

Kedua konten tersebut secara singkat berisikan informasi yang seolah-olah memprovokasikan penolakan terkait adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai bentuk keberpihakan LPP RRI terhadap masyarakat. Yang di mana, hal ini tentunya bertentangan atau tidak sejalan dengan misi LPP RRI yang berbunyi *“memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden”*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dikarenakan LPP RRI yang merupakan lembaga yang menaungi portal berita *online* RRI.co.id ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, seharusnya mereka dapat mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Kebijakan Efisiensi Anggaran melalui penyampaian yang bersifat informatif, mendidik, menghibur, dan tetap mengandung fungsi kontrol sosial. Meskipun begitu, di lain sisi LPP RRI juga harus tetap menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dan menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya *conflict of interest* yang terjadi pada LPP RRI. Dari adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, LPP RRI melakukan Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) secara massal kepada karyawan lepas LPP RRI. Setelah isu ini *viral*, LPP RRI pada akhirnya membatalkan pemecatan karyawan lepasnya atas desakan Komisi VII DPR RI. Dari sinilah, LPP RRI pun mulai berbicara berdasarkan atas kepentingannya sendiri seolah-olah sebagai bentuk klarifikasi atau perlawanannya atas isu internal yang terjadi dengan menyajikan berita melalui media *online* yang dimilikinya, yaitu RRI.co.id.

*“Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah misalnya di Sumatera Barat. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama dirumahkan.”* (Konten 5)

*“Direktur Utama (Dirut) RRI I Hendrasmo menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawai RRI non ASN di lingkungannya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR membahas program kerja dan anggaran 2025.”* (Konten 6)

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh media *online* RRI.co.id terkait pemberitaan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Menurut Erving Goffman, *framing* didefinisikan sebagai skema interpretasi yang memberikan kemungkinan bagi seseorang menyusun, melihat, mengenali, serta memberikan label pada berbagai peristiwa atau pengalaman hidup (Santi, 2012). *Framing* dalam pemberitaan merujuk pada cara media memilih dan menyajikan informasi dengan cara tertentu

untuk membentuk persepsi publik mengenai suatu isu. Analisis *framing* pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran pada RRI.co.id sangat relevan untuk mengetahui bagaimana media ini membingkai informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara, terutama lembaga publik seperti LPP RRI yang merupakan kaki tangan dari pemerintahan sebagai salah satu lembaga penyiaran milik negara, tetapi juga bersifat independen dan netral.

Penelitian ini menggunakan teori *Agenda Setting* yang menyatakan bahwa media berperan penting dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik, bukan dengan memberi tahu apa yang harus dipikirkan, tetapi dengan menyoroti isu tertentu agar mendapat perhatian (Littlejohn et al., 2016). Proses ini melibatkan pemilihan dan penonjolan isu oleh media yang kemudian membentuk agenda publik dan bahkan dapat memengaruhi agenda kebijakan. Teori ini menekankan tanggung jawab besar media dalam membentuk opini publik, sebagaimana terlihat dalam konteks Indonesia ketika isu-isu seperti bencana alam atau korupsi diberitakan secara masif. Pada tingkat lanjutan, konsep *framing* yang berasal dari pemikiran Erving Goffman (1959) dan diperluas oleh Littlejohn et al. (2016) serta Entman (1993), menjelaskan bahwa media tidak hanya menetapkan isu penting, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut melalui

pemilihan kata, penyusunan narasi, dan sudut pandang. *Framing* adalah proses konstruksi realitas sosial dengan menonjolkan aspek tertentu untuk membentuk definisi masalah, interpretasi, penilaian moral, dan rekomendasi solusi (Entman, 1993; Eriyanto, 2012; Santi, 2012).

Teori selanjutnya, yaitu teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan hasil dari konstruksi individu melalui proses interaksi sosial yang bersifat dialektik—meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1991; Zainuddin, 2013). Individu dianggap sebagai agen aktif yang secara kreatif membentuk dan mereproduksi dunia sosialnya, bukan sebagai pihak yang tunduk pada fakta sosial (Demartoto, 2013). Realitas sosial ini diciptakan dan dipertahankan melalui bahasa dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diwariskan lintas generasi. Dalam konteks media massa sebagai aktor sosial, realitas yang ditampilkan dalam pemberitaan merupakan hasil konstruksi yang dapat berbeda antara satu media dengan lainnya, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing (Rifa'i, 2024).

Teori terakhir, *public journalism*, yang menurut Jay Rosen (1999) adalah pendekatan jurnalistik yang menempatkan media sebagai fasilitator dialog publik dan partisipasi warga dalam demokrasi, bukan sekadar penyampai

informasi atau perpanjangan tangan elite politik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap menurunnya partisipasi politik, meningkatnya apatisme, dan krisis kepercayaan publik terhadap media arus utama (Adi, 2016). Berbeda dengan jurnalisme tradisional yang cenderung *top-down*, *public journalism* mendorong pelibatan warga dalam proses liputan dan penentuan agenda media. Teori ini sejalan dengan komunikasi partisipatoris dan demokrasi deliberatif (McQuail, 2010), serta terkait dengan agenda setting tingkat kedua yang menyoroti bagaimana media membingkai isu (McCombs & Shaw, 1972). Meski demikian, pendekatan ini dikritik karena berpotensi mengaburkan objektivitas jurnalistik dan menimbulkan konflik kepentingan (Glasser, 1999). Secara keseluruhan, teori ini menawarkan pandangan baru tentang peran media sebagai institusi sipil yang membentuk masyarakat partisipatif dan kritis.

Terdapat 5 penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Prisco Gusni Taregan dan Nurul Haniza (2021) dalam *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Sahid* menganalisis praktik *framing* oleh Suara.com dan Beritasatu.com terkait pernyataan kontroversial Menteri Sosial Tri Rismaharini tentang “memindahkan pegawai ke Papua” menggunakan model analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menemukan bahwa Suara.com

membangkai pernyataan Risma secara negatif dengan menekankan unsur pengecaman dan kontroversi, sementara Beritasatu.com menampilkan *framing* yang lebih netral dan fokus pada klarifikasi serta niat motivasional dari pernyataan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan wacana antar media dalam menyampaikan isu yang sama.

Penelitian kedua, penelitian oleh Muhammad Refi Sandi, Maimon Herawati, dan Justito Adiprasetyo (2022) dalam *Kajian Jurnalisme Universitas Padjadjaran* menganalisis *framing* pemberitaan media, khususnya Detik.com, terhadap peristiwa meninggalnya HS, supporter 'The Jakmania' di Bandung, akibat pengeroyokan oleh oknum 'bobotoh'. Dengan menggunakan model analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini meninjau bagaimana pemilihan gambar, kata, serta kelengkapan unsur 5W+1H digunakan wartawan dalam menyusun berita, serta bagaimana struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik membentuk narasi kejahatan dan identitas korban. Dari enam berita yang dianalisis, empat menonjolkan identitas korban secara eksplisit, sementara dua lainnya berbeda hanya pada judul, menunjukkan bahwa media memiliki peran besar dalam mengonstruksi realitas sosial atas kasus kekerasan antarsuporter.

Penelitian ketiga, penelitian oleh Rama Dhaniel (2021) dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas*

*Muhammadiyah Tapanuli Selatan* menganalisis *framing* media *online* Padang Ekspres terkait pemberitaan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19, menggunakan model *framing* Robert Entman. Penelitian ini mengkaji bagaimana media membangkai masalah keterbatasan akses teknologi dan internet yang dialami siswa serta kebijakan pemerintah dalam merespons tantangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Padang Ekspres membangkai kebijakan pemerintah sebagai langkah yang kurang tegas dan terlalu berhati-hati, karena dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap potensi peningkatan penyebaran Covid-19, khususnya di lingkungan sekolah.

Penelitian keempat, penelitian oleh Mikho Fridolin Siahaan dan Nawiroh Vera (2024) dalam *Komunikasi57: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* menganalisis *framing* pemberitaan aturan penggunaan pengeras suara masjid oleh Kompas.com dan Detik.com menggunakan model Robert N. Entman. Penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan kedua media dalam menyajikan kontroversi atas surat edaran Kementerian Agama—Detik.com lebih menonjolkan kritik Gus Miftah yang membandingkan aturan tersebut dengan kebisingan dangdut, sedangkan Kompas.com memberikan penjelasan kebijakan dan tanggapan tokoh publik seperti Buya Syafii. Meski berbeda pendekatan, kedua media sama-sama membangkai isu ini dengan fokus pada pentingnya kenyamanan dan

keharmonisan masyarakat, serta menyoroti ketidaksesuaian pemahaman Gus Miftah terhadap isi surat edaran tersebut.

Penelitian terakhir, penelitian oleh Rizkia Putri dan Hendra Setiawan (2023) dalam *Jurnal Educatio Universitas Majalengka* menganalisis *framing* pemberitaan kasus pelecehan seksual oleh oknum dosen Universitas Andalas di media *Tribunnews.com* dan *Detik.com* menggunakan metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kedua media menggunakan struktur piramida terbalik dengan topik utama di awal, keduanya memiliki gaya penyajian yang berbeda dalam membingkai isu kekerasan seksual, mencerminkan karakteristik khas masing-masing media dalam mengonstruksi realitas pemberitaan.

Persamaan yang didapat dari kelima penelitian sebelumnya dan penelitian ini ada pada teori, paradigma penelitian (paradigma konstruktivisme), pendekatan (kualitatif), tipe penelitian (deskriptif), jenis data (teks atau kata-kata), teknik pengumpulan data (observasi dan dokumentasi), dan metode analisis data (model Robert Entman) di 2 dari 5 penelitian sebelumnya. Sedangkan, perbedaan yang didapat dari lima penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni ada pada topik dan media *online* yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, adanya perbedaan metode analisis data (metode

Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki) pada 3 dari 5 penelitian sebelumnya.

Pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran di media *online* RRI.co.id menjadi topik yang relevan dan perlu dianalisis untuk memahami bagaimana isu tersebut disampaikan kepada publik. Mengingat RRI.co.id merupakan media *online* di bawah Lembaga Penyiaran Publik RRI yang bersifat netral dan independen, namun juga harus tetap mendukung kebijakan pemerintah seperti Kebijakan Efisiensi Anggaran. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh media *online* RRI.co.id dalam menyampaikan informasi mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam dengan memberikan gambaran dari media *online* RRI.co.id dalam membingkai pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berita-berita terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran yang dimuat oleh media *online* RRI.co.id, dengan cara memasukkan kata kunci (*keyword*) 'efisiensi anggaran' pada kolom pencarian (*search bar*). Sedangkan,

teknik observasi dilakukan untuk memahami bagaimana media *online* RRI.co.id menyajikan pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

Model *framing* oleh Robert Entman (1993) digunakan pada penelitian ini dikarenakan pendekatan ini secara khusus dirancang untuk mengungkap bagaimana media membingkai suatu isu, baik dari segi isi maupun cara penyajiannya. Dalam konteks Kebijakan Efisiensi Anggaran, isu tersebut tentu memiliki banyak dimensi, seperti misalnya pendidikan, ekonomi, politik, sosial, bahkan birokrasi. Model Entman ini memungkinkan peneliti mengurai bagaimana media *online* seperti RRI.co.id menonjolkan aspek tertentu dari kebijakan tersebut, dan mengabaikan aspek lainnya.

Model *framing* yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993) menyoroti bagaimana media memilih dan menonjolkan elemen-elemen informasi tertentu dalam pemberitaan untuk disampaikan kepada audiens mengenai isu atau peristiwa. Dengan mendefinisikan masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat penilaian moral, serta menekankan penyelesaian, media membingkai pesan dengan menonjolkan beberapa aspek dan juga mengabaikan aspek-aspek lainnya. Model ini dapat membantu untuk memahami bagaimana *framing* yang dilakukan oleh media dalam menyajikan informasi mengenai kebijakan, peristiwa sosial, atau isu-isu tertentu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Temuan Data

*Define problem* atau mendefinisikan masalah merupakan tahap pertama dari model *framing* Robert N. Entman. Tahap ini menentukan sesuatu yang dinilai sebagai masalah mengenai suatu isu. Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan masalah dari total 8 artikel dengan melihat dari 2 perspektif yang berbeda, di antaranya adalah perspektif penekanan informasi dan perspektif konteks. Perspektif penekanan informasi lebih melihat ke arah informasi apa yang dikaji di dalam artikel tersebut mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran, sedangkan perspektif konteks lebih melihat ke arah bidang apa yang disorot terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran pada artikel tersebut.

Pada perspektif penekanan informasi, terdapat sebanyak 3 artikel, yaitu artikel 1, 2, dan 5, yang memberikan pendapat yang menentang, baik berupa peringatan maupun kritik kepada pemerintah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran. Berikutnya, sebanyak 3 artikel, yaitu artikel 3, 4, dan 7, yang disajikan sebagai bentuk dari rasa kekhawatiran terhadap diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran ini. Serta, terdapat 2 artikel, yaitu artikel 6 dan 8, yang merupakan sebagai bentuk reportase dari aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang menentang adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran.

Pada perspektif konteks, terdapat sebanyak 5 artikel, yaitu artikel 4, 5, 6, 7, dan 8, yang menyoroti dampak dari Kebijakan Efisiensi Anggaran ini terhadap bidang pendidikan yang dianggap sebagai bidang yang cukup krusial bagi masa depan Tanah Air. Kemudian, sebanyak 2 artikel, yaitu artikel 1 dan 2, yang membicarakan konsekuensi yang diberikan dari adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran kepada kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Terdapat 1 artikel, yaitu artikel 3, yang menyoroti adanya kemungkinan munculnya krisis fiskal baru dari terbentuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

*Diagnose Causes* atau memperkirakan sumber masalah dengan mengidentifikasi serta menonjolkan sesuatu yang dinilai sebagai sumber masalah. Dari total 8 artikel yang diteliti, secara keseluruhan, sumber masalahnya terdapat pada setelah diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2022. Kebijakan yang dibentuk dengan tujuan sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang lebih efektif. Namun, muncul beberapa kontra dari berbagai pihak, seperti para ahli atau pengamat ekonom, akademisi, mahasiswa, dan bahkan jurnalis dari media *online* RRI.co.id

itu sendiri setelah pengimplementasian Kebijakan Efisiensi Anggaran ini dianggap kurang selektif.

*Make moral judgement* atau membuat penilaian moral yang disisipkan dalam penyajian dari suatu informasi, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait mengenai isu tersebut, entah secara langsung atau tidak langsung. Dari total 8 artikel yang diteliti, secara keseluruhan, penilaian moral yang diberikan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran ini mengarah pada konteks pembangunan ekonomi, pengelolaan anggaran, dan peran pendidikan sebagai elemen fundamental dalam keadilan sosial. Seperti pada artikel 1 yang menekankan bahwa sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah haruslah yang memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial secara luas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab guna menjamin peningkatan kinerja institusional dan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat beberapa artikel yang menyoroti pentingnya sikap kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan dan mengeksekusi kebijakan, seperti pada artikel 2 dan 3, terutama dalam hal pengalokasian anggaran

ke program-program tertentu, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemudian, penilaian moral yang diberikan pada artikel 4, 5, 6, dan 7, yakni kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan secara mendalam pada aspek sosial berisiko mengabaikan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya, tidak hanya itu, bahkan dapat memperparah ketimpangan sosial, seperti yang dicontohkan melalui berkurangnya bantuan pendidikan yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan antar siswa. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya diposisikan sebagai sektor teknis, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia yang adil. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran pendidikan tidak hanya berdampak pada aksesibilitas, tetapi juga menyentuh dimensi moral, karena pendidikan termasuk ke dalam salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh negara kepada seluruh warga tanpa diskriminasi. Terakhir, pada artikel 8, dicantumkannya aspirasi mahasiswa yang diterima oleh DPRD Kota Bogor menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Meskipun muncul keraguan mengenai efektivitas dari proses ini, keberadaannya tetap menjadi indikator bahwa demokrasi deliberatif harus terus diperkuat.

***Treatment recommendation*** atau penekanan penyelesaian yang diusulkan

oleh pihak media atau pihak lainnya dalam menangani persoalan isu yang telah didefinisikan. Dari total 8 artikel yang diteliti, 3 di antaranya menawarkan penyelesaian atau solusi yang lebih menyoroti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyelesaian yang ditawarkan pada artikel 1 yakni pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menyatukannya dengan program-program yang sudah ada sebelumnya, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, termasuk kerja sama dengan lembaga filantropi. Kerja sama ini diyakini bisa membuat manfaat program lebih luas dan membantu mengurangi beban keuangan negara. Kemudian pada artikel 3, mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berdasarkan data (*targeted approach*), agar bantuan benar-benar diberikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Dengan begitu, keberhasilan program bisa lebih mudah diukur dan dievaluasi. Selain itu, artikel 5 juga meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tidak memaksakan menjalankan program-program baru, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), jika kondisi keuangan negara terbatas, agar layanan penting lainnya yang lebih mendesak tidak terganggu.

Selain itu, pada artikel 2, penekanan penyelesaian yang diberikan yaitu pemerintah diminta untuk perlu lebih terbuka mengenai tujuan, cara mengukur keberhasilan, dan sasaran dari Kebijakan Efisiensi Anggaran, agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan mendukung kebijakan tersebut dengan lebih percaya. Pemerintah pun diminta untuk tetap cermat agar pengurangan pengeluaran negara tidak berdampak buruk pada sektor penting seperti pendidikan, karena pendidikan adalah dasar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, seperti yang tercantum pada artikel 4. Tidak hanya itu, penekanan penyelesaian yang tercantum pada artikel 8 yakni berupa pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% akan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan negara kini lebih fokus pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan jangka panjang. Gabungan dari kerja sama antar pihak, keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang bijak, serta keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat menjadi dasar penting untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Namun, 2 dari 8 artikel yang diteliti, tidak menawarkan atau mencantumkan *treatment recommendation* atau penekanan penyelesaian atau solusi. Sehingga, bisa

dikatakan bahwa 2 artikel tersebut tidak memenuhi keempat elemen model *framing* oleh Robert N. Entman dalam penyajian beritanya.

## **2. Pembahasan**

Media *online* RRI.co.id mengidentifikasi akar penyebab persoalan yang diangkat dalam pemberitaannya sebagai konsekuensi langsung dari diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran yang secara resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun kebijakan tersebut baru diberlakukan secara formal pada 22 Januari 2025, RRI.co.id menyoroti bahwa dinamika penyebab yang melatarbelakangi ketegangan publik dan meningkatnya respons kritis dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok akademisi, tidak dapat dilepaskan dari momen awal pemberlakuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, media ini secara spesifik menempatkan diterbitkannya Inpres tersebut sebagai awal mula pemicu lahirnya kritik, kekhawatiran, dan perlawanan, yang kemudian menjadi topik utama dalam pemberitaan dan narasi kritik terhadap potensi dampak dari berbagai sektor yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

RRI.co.id, dalam pemberitaannya, menampilkan narasi yang tidak hanya berisi pandangan yang berseberangan terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran, tetapi juga

memperlihatkan sikap kritis yang mencakup peringatan serta bentuk penolakan yang disampaikan kepada pemerintah. Sikap kritis ini tidak sekadar bersifat argumentatif, melainkan juga terwujud dalam bentuk peliputan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa sebagai representasi publik yang menentang kebijakan tersebut. Lebih lanjut, RRI.co.id menyampaikan kekhawatiran mendalam atas diterbitkannya kebijakan ini, yang dinilai dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap berbagai sektor strategis (Mallongi et al., 2025). Dalam konteks pemberitaan yang lebih luas, media ini juga berupaya membingkai isu efisiensi anggaran sebagai problem struktural dengan menyoroti implikasi langsungnya terhadap sektor pendidikan, penurunan kinerja dan produktivitas tenaga kerja, hingga potensi munculnya krisis fiskal baru, terutama akibat pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berisiko membebani APBN secara berkelanjutan.

RRI.co.id juga menyampaikan penilaiannya terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dengan menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi yang adil, tata kelola anggaran negara yang transparan dan berkeadilan, serta peran pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Media ini menekankan bahwa Kebijakan Efisiensi Anggaran tidak bisa

jika hanya fokus pada pengurangan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terutama pada sektor penting seperti pendidikan (Zaluchu, 2025). RRI.co.id memandang pendidikan sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial, sehingga jika anggaran untuk sektor ini dipangkas secara tidak adil atau tanpa adanya pertimbangan, maka dampaknya bisa merugikan masa depan generasi muda dan memperjelas adanya kesenjangan sosial. Selain itu, media ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang adil dan bijak, agar pembangunan ekonomi bisa dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pemberitaan RRI.co.id menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kebijakan ini. Dengan kata lain, RRI.co.id menilai bahwa Kebijakan Efisiensi Anggaran harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik, bukan sekadar angka dan efisiensi semata. Sehingga, LPP RRI, sebagai pemilik dari media *online* RRI.co.id, sudah bisa dikatakan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat dengan turut mengikutsertakan peran masyarakat di dalam pemberitaannya (PP No. 11, 2005).

Tidak hanya itu, RRI.co.id menawarkan penyelesaian atau solusi yang menekankan

pentingnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kolaboratif. Media ini menekankan agar pelaksanaan program tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau dipaksakan, melainkan dengan strategi yang lebih tepat sasaran (*targeted approach*) dan memperhatikan seperti apa kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, RRI.co.id juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dan cermat dalam mengimplementasikan Kebijakan Efisiensi Anggaran, terutama dengan memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara transparan, baik dalam hal tujuan maupun target yang ingin dicapai. Transparansi ini dianggap penting agar publik dapat memahami arah kebijakan dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan. Namun, meskipun sebagian besar artikel menunjukkan kecenderungan untuk memberikan saran dan tawaran solusi, masih terdapat 2 artikel yang tidak mencantumkan atau menekankan aspek penyelesaian.

Dalam kerangka teori konstruksi sosial, media massa seperti RRI.co.id tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang secara aktif membentuk dan mengonstruksi realitas sosial melalui pilihan kata, sudut pandang, serta penekanan isu dalam pemberitaan (Rifa'i, 2024). Dalam konteks pemberitaan

mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran, RRI.co.id tidak sekadar melakukan produksi berita berdasarkan fakta-fakta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan juga membentuk pemahaman publik melalui cara bagaimana isu tersebut dibingkai. Media ini menampilkan kritik, kekhawatiran, serta peliputan aksi mahasiswa sebagai bentuk konstruksi bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan sektor penting seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial. Melalui pemberitaan yang konsisten menyoroti dampak negatif serta pentingnya transparansi dan kehati-hatian, media ini secara tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut (Eriyanto, 2012). Dengan demikian, penerapan teori konstruksi sosial dalam penelitian ini membantu mengungkap bagaimana realitas Kebijakan Efisiensi Anggaran tidak bersifat objektif semata, melainkan dibentuk melalui proses komunikasi media yang bersifat selektif dan sarat dengan makna sosial.

Pendekatan *public journalism* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai bagaimana media *online* RRI.co.id membingkai isu Kebijakan Efisiensi Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Public Journalism* ini berangkat dari gagasan Jay Rosen (1999) bahwa jurnalisme seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi,

tetapi juga sebagai fasilitator dialog publik dan penguat partisipasi warga negara dalam proses demokrasi (Adi, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan *public journalism* terlihat sudah diterapkan oleh media *online* RRI.co.id dalam membingkai pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. RRI.co.id dalam beberapa artikelnya menunjukkan upaya untuk menyampaikan perspektif kritis terhadap kebijakan tersebut, seperti menampilkan pendapat dari pihak yang menentang, menyoroti dampak terhadap sektor pendidikan, serta memberitakan aksi demonstrasi mahasiswa. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran media dalam mengangkat suara publik sebagai bagian dari fungsi demokratis media.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip *public journalism* belum sepenuhnya konsisten. Dalam beberapa berita, pemberitaan masih cenderung bersifat *top-down* dan fokus pada narasi resmi pemerintah tanpa membuka ruang partisipasi wacana dari masyarakat yang terdampak secara langsung. Selain itu, pada elemen penekanan penyelesaian atau solusi yang ditawarkan media juga belum merata di semua artikel, yaitu 6 dari total 8 artikel yang diteliti, yang menampilkan ajakan kolaborasi, kehati-hatian dalam implementasi, dan transparansi pemerintah. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi penerapan nilai-nilai *public*

*journalism*, seperti kepedulian terhadap kepentingan publik dan pendidikan, pemberitaan RRI.co.id masih memperlihatkan keterbatasan dalam menjalankan peran media sebagai fasilitator dialog publik dan penggerak partisipasi warga secara menyeluruh.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

a. **Define Problem** pada RRI.co.id, yaitu dengan menyajikan pemberitaan yang berisikan pendapat yang menentang, baik berupa peringatan maupun kritik kepada pemerintah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kemudian, media ini juga menyajikannya sebagai bentuk dari rasa kekhawatiran terhadap diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran serta sebagai bentuk reportase dari aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang menentang adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran.

Tidak hanya itu, secara konteks, RRI.co.id juga mendefinisikan masalah dengan menyoroti dampak dari Kebijakan Efisiensi Anggaran ini terhadap bidang pendidikan, kinerja dan produktivitas tenaga kerja, serta kemungkinan munculnya krisis fiskal baru dari adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada elemen **define problem** atau definisi masalah, isu yang diseleksi

oleh RRI.co.id yaitu berupa Kebijakan Efisiensi Anggaran yang menuai kritik, aksi penolakan, dan berdampak negatif. Dari isu tersebut, kemudian RRI.co.id menonjolkan beberapa aspek, seperti kritik publik, kekhawatiran, demonstrasi mahasiswa, dan dampak pada pendidikan, tenaga kerja, serta fiskal.

b. **Diagnose Causes** pada RRI.co.id, yaitu secara keseluruhan, terdapat pada setelah diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2022.

Pada elemen **diagnose causes** atau sumber masalah, isu yang diseleksi oleh RRI.co.id yaitu Kebijakan Efisiensi Anggaran itu sendiri. Dari isu tersebut, kemudian RRI.co.id menonjolkan aspek berupa tindakan Presiden Prabowo dalam menerbitkan kebijakan tersebut melalui Inpres No.1 Tahun 2025 sebagai sumber masalahnya.

c. **Make Moral Judgement** pada RRI.co.id, yaitu secara keseluruhan mengarah pada konteks pembangunan ekonomi, pengelolaan anggaran, dan peran pendidikan sebagai elemen fundamental dalam keadilan sosial.

Pada elemen **make moral judgement** atau keputusan moral, isu yang diseleksi oleh RRI.co.id yaitu Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan keadilan sosial. Dari isu tersebut, kemudian RRI.co.id menonjolkan aspek yang berdasarkan dampak terhadap pembangunan, keadilan pengelolaan anggaran, dan pentingnya pendidikan dalam struktur sosial.

d. **Treatment Recommendation** pada RRI.co.id, yaitu dengan menawarkan penyelesaian atau solusi yang lebih menyoroti pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk saling berkolaborasi, melakukan *targeted approach*, serta berhati-hati dan tidak terlalu memaksakan. Tidak hanya itu, pada media ini, pemerintah juga diminta untuk lebih cermat dalam pengimplementasian Kebijakan Efisiensi Anggaran serta melakukan transparansi mengenai tujuan dan targetnya. Meskipun, masih ditemukan sebanyak 2 artikel yang tidak mencantumkan penekanan penyelesaian dalam penyajian beritanya.

Pada elemen **treatment recommendation** atau penekanan penyelesaian, isu yang diseleksi oleh RRI.co.id yaitu berupa implementasi

Kebijakan Efisiensi Anggaran dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari isu tersebut, kemudian RRI.co.id menonjolkan beberapa aspek, seperti kolaborasi, pendekatan tepat sasaran, kehati-hatian, serta transparansi pemerintah.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di atas adalah bahwa seleksi isu yang dilakukan oleh media *online* RRI.co.id yaitu dengan menyajikan isu terkait dampak dari diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kemudian, dari isu yang diseleksi tersebut, media *online* RRI.co.id menonjolkan beberapa aspek yang berulang terhadap isu terkait dampak dari diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran. Aspek tersebut, di antaranya yaitu ada pada aspek pendidikan, pembangunan ekonomi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

## 2. Saran

- a. Meskipun sebagai media yang dimiliki secara langsung oleh negara, RRI juga tetap perlu memperkuat independensi redaksional agar tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik yang bersifat netral. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan membangun mekanisme editorial yang menjamin kebebasan jurnalis dalam menentukan sudut pandang pemberitaan, tanpa tekanan politik atau kepentingan institusional. Hal ini

dikarenakan masih minimnya artikel pada RRI.co.id yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat.

- b. RRI.co.id juga disarankan untuk menerapkan pendekatan jurnalisme solutif, yaitu tidak hanya melaporkan kebijakan secara formal, tetapi juga menjelaskan konteks, dampak, dan alternatif solusi yang relevan bagi masyarakat. Mengingat dalam penelitian ini masih ditemukan sebanyak 2 artikel yang tidak memberikan penekanan penyelesaian atau solusi pada penyajian pemberitaannya.
- c. Pihak manajemen RRI.co.id juga perlu melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap konten pemberitaan, khususnya pada isu-isu sensitif yang melibatkan kebijakan negara. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan sekadar sebagai corong kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. S. (2016). Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi. *Jurnal Nomosleca*, 2(1). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v2i1.341>
- Anggela, N. L. (2025, February 10). *Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal*

- Karyawan RRI*. Bisnis.com.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250210/12/1838347/menaker-buka-suara-soal-kabar-phk-massal-karyawan-rri>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality* (6th ed.). Penguin Books.
- Demartoto, A. (2013, April 10). *Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*.  
<https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (2nd ed.). LKiS Group.
- Glasser, T. L. (1999). *The Idea of Public Journalism*. Guilford Press.
- Inpres No.1*. (2025, January 22). JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
- KPPN, R. (2024, August 13). *Peran Media dalam Menyebarkan Informasi Ekonomi yang Akurat dan Tepat*.  
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3685-peran-media-dalam-menyebarkan-informasi-ekonomi-yang-akurat-dan-tepat.html>
- Littlejohn, S., Foss, K., & Oetzel, J. (2016). *Theories of Human Communication* (Eleventh Edition). Waveland Press, Inc.
- Mallongi, A. A., Athoriq R., M. A. C., Qolby, A. N. A., & Agustin, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212–226.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed., Vol. 1). SAGE Publications, Inc.
- PP No. 11*. (2005, March 18). JDIH BPK.
- PPID LPP RRI*. (n.d.). Retrieved June 28, 2024, from <https://ppid.ri.go.id/profil-ri>
- Rifa'i, A. B. (2024). Realitas Media dan Konstruksi Sosial Media. *Journal of Islamic Social Science and Communication*, 3(1), 29–42.
- Santi, S. (2012). Frame Analysis: Konstruksi Fakta dalam Bingkai Berita. *Forum Ilmiah*, 9(3), 219–232.
- Saputra, Y., Chaniago, H., & Amri, D. (2025, February 12). *Efisiensi anggaran: TVRI dan RRI batal “rumahkan” pegawai imbas efisiensi anggaran Prabowo – “Saya berharap honor kami bisa kembali seperti semula.”* BBC News Indonesia.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdd9vr4lgm9o>
- UU No. 32*. (2002, December 28). KPI Pusat.
- Zainuddin, H. (2013, November 11). *Teori Konstruksi Sosial*. Uin-Malang.Ac.Id.  
<https://uin->

malang.ac.id/blog/post/read/131101/te  
ori-konstruksi-sosial.html

Zaluchu, S. E. (2025, February 20). *Efisiensi  
Anggaran Jangan Korban  
Masyarakat*. detiknews.  
[https://news.detik.com/kolom/d-  
7787438/efisiensi-anggaran-jangan-  
korbankan-masyarakat](https://news.detik.com/kolom/d-7787438/efisiensi-anggaran-jangan-korbankan-masyarakat)